

AIR PAM MAKIN ASIN, OMBUDSMAN DESAK SOLUSI CEPAT

Jum'at, 25 September 2026 - kalsel

RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN - Krisis air baku yang melanda PTAM Bandarmasih makin serius. Intrusi air laut membuat kadar garam (klorida) pada air baku yang diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) 1 A Yani mencapai sekitar 7.300 mg/L. Dalam catatan pemantauan petugas secara berkala selama 24 jam terakhir, kadar garam disebut konsisten berada di atas 1.000 mg/L.

Kondisi ini menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel). Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Hadi Rahman menegaskan, air dengan kadar klorida setinggi itu berisiko jika dikonsumsi masyarakat.

Saat memantau IPA 1 A Yani di Intake Sungai Bilu pada Rabu (23/9) siang, kadar garam berada di kisaran 7.300 mg/L. Dalam catatan pemantauan petugas secara berkala selama 24 jam terakhir, kadar garam disebut konsisten berada di atas 1.000 mg/L.

"Kondisi tersebut tidak bisa dianggap sepele. Sebab, kadar klorida yang terpantau jauh di atas batas yang diperbolehkan untuk air minum berdasarkan ketentuan kesehatan yang dirujuk Ombudsman," kata Hadi, Kamis (24/9/2026).

Dikatakan, ada tiga hal yang harus menjadi perhatian utama PTAM Bandarmasih dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yakni kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

Menurutnya, tiga aspek tersebut juga kerap muncul dalam pengawasan maupun laporan masyarakat yang diterima Ombudsman. Karena itu, ketiganya dinilai perlu menjadi perhatian serius manajemen perusahaan.

Kadar garam yang tinggi berdampak terhadap tiga wilayah, yakni Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah terdampak persoalan air baku. Sementara Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan tidak terdampak karena menggunakan sumber air baku yang berbeda.

Diketahui bahwa langkah cepat yang dilakukan PTAM Bandarmasih mendistribusikan air bersih darurat. Mobil tangki dikerahkan, sementara tandon disiapkan di sejumlah lokasi dengan menggandeng masjid dan musala sebagai tempat penampungan.

Ombudsman meminta informasi mengenai layanan air layak konsumsi tersebut disampaikan secara luas kepada masyarakat. Termasuk lokasi tandon, jalur mobil tangki, mekanisme pengambilan air hingga penegasan bahwa air tersebut diberikan secara gratis.

"Jumlah tandon ditambah dan frekuensi pengisian memungkinkan dilakukan setiap hari. Dengan begitu, warga tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan air," sarannya.

Namun, Ombudsman mengingatkan langkah tersebut baru solusi jangka pendek. PAM Bandarmasih bersama pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi jangka menengah dan panjang agar krisis air baku tidak terus berulang.

Sejumlah rencana yang disorot di antaranya pemasangan pipa transmisi 1.200 milimeter dari Pematang menuju IPA 2 Pramuka, pembangunan embung dan bak prasedimentasi sebagai cadangan air baku, serta rehabilitasi jaringan pipa yang rawan mengalami kebocoran.

"Kami harapkan bisa diatensi dan didukung pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov)Kalsel dan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin, sehingga menjadi aksi nyata yang berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat," pungkash Hadi.

Dirut PTAM Bandarmasih Zulbadi mengatakan pihaknya sudah menjelaskan antisipasi hal ini terjadi sudah menyiapkan rencana jangka panjang kepada Ombudsman. Salah satunya pemasangan pipa transmisi serta pembangunan infrastruktur pendukung air baku.

Selain itu, komunikasi dengan pemerintah daerah terus dilakukan. Zulbadi menyebut pihaknya telah melakukan audiensi dengan Gubernur Kalsel dan Wali Kota Banjarmasin untuk membahas persoalan air baku.

"Kita tidak bicara untuk saat ini saja. Kasihan generasi-generasi berikut kalau kondisinya sama dengan sekarang," ujarnya.

Zulbadi bahkan berharap persoalan krisis air baku seperti yang terjadi saat ini tidak kembali terulang tahun depan. Untuk mewujudkannya, PTAM Bandarmasih akan mengupayakan berbagai aspek, mulai dari teknis hingga penganggaran dan pendanaan.

"Jangankan masyarakat, saya sendiri pun menginginkan tahun depan tidak terjadi lagi. Harus bisa kita atasi dengan segala upaya, baik dari sisi penganggaran, dari sisi teknis maupun dari sisi pendanaan," pungkashnya.